

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Dahri, I., & Yunus, S. (2022). *Pengantar Restorative Justice*. Bogor: Guepedia.
- Daly, K. (2006). The Limits of Restorative Justice. Dalam D. Sullivan, & L. Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. Brisbane: School of Criminology and Criminal Justice.
- Dandurand, V., Sharpless, R., & Vogt, A. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes, 2th Editions*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Daniel. (2014). *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan) Cetakan ke-4*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Diantha, I. M. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Dignan, J. (2005). *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*. Newyork: pen University Press.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-Kapindonesia.
- Ishaq, S. 2020. *Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Mangku, S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Sulistyani, D. (2013). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jawa Barat: PT Alumni Bandung.

- Munti, R. B. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.
- Nurtjahyo, I., & Choky, R. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*. Kencana Prenada Media.
- Rizal, C.H. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana
- Santoso, T. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada.
- Sianturi, S. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika.
- Sudarto. 2015. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sullivan, D., & Tiff, L. (2006). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. Newyork: Routledge.
- Solikin, N. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media.
- Tenriawaru, dkk. 2022. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (PLEA BARGAIN VS RESTORATIVE JUSTICE)*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Zaidan, A. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal

- Ahyun, Q. 2022. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*. 92-97.

- Antari, D. 2021. Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal Ham, Volume 12, Nomor 1*, 75-80.
- Chandra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. 264.
- Darmakanti, M., Yuliantini, R., & Mangku, S. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 2*, 1-10.
- Eddyono, S. W. (2018). *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan UU PKDRT*.
- Hanafi, A., & Ningrum, A. 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al Adl, Vol. 10, No 2*, 14.
- Hasan, H. (2003). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2*.
- Hendrayana, D., Yuliantini, R., & Mangku, S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 2*, 18-28.
- Huda & Izza. 2022. Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi Ruu Pks Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ipmhi Law Journal*, 173-187.
- Indriyani. 2021. Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Ijouis: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 44-45.
- Kurnia. 201. Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban. *Gema*, 1497-1508.
- Manan, B. (2006). Keadilan restoratif (suatu pengenalan). *Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke-XXI Nomor 247 Edisi Juni*.
- Morris, A., & Maxwel, G. (2001). Restorative Justice for Junvile: Conferencing. *Medation and Circle, Oxford-Portland Oregeon USA*.

- Paradias, R., & Soponyono, E. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1*, 61-72.
- Purba, J. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice. 69.
- Safitri, S., Ardiansah, D., & Andrian, P. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 29-44.
- Subyakto. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Suryandi, Dkk. 2020. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung Volume 28 Nomor 1*, 84-91.
- Swandari, M., & Hariyanto, S. 2022. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No 11* , 1803-1814.
- Tio, G. D. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 156-158.
- Weatherbun, D. (2013). A Review of Restorative Justice Responses to Offending. *Evidence Base, Issue 1*, 12-13.

Tesis

- Syah, N. (2019). Analisis Hukum Terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian. *Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Artikel Dalam Internet

- Ashila, B. I., & Maharani, M. 2021, Juli 7. *Tentang: story*. Diakses dari magdalene.com: <https://magdalene.co/story/nikahkan-korban-dan-pelaku-pemeriksaan-bukan-solusi>. Pada 1 Januari 2024
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. 2023. *Pidana: Hukumonline.Com*. Diakses Dari Hukumonline.Com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, Pada Tanggal 28 Agustus 2023
- Kalis, G. S. 2020. *Kesehatan Umum: Doktersehat.Com*. Diakses Dari Doktersehat.Com: <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/kekerasan-seksual/>, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Saptohutomo, P. A. (2022, Februari 15). *News: Kompas.Com*. Diakses Dari Kompas.Com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia#>, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
- Savitri, P. I. 2022. *Tentang: berita*. Diakses dari antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/2837553/wamenkumham-uu-tpks-tonjolkkan-aspek-keadilan-restoratif>. Pada Tanggal 2 Januari 2024
- Wahyuni, W. (2022, Desember 12). *Terbaru; Hukumonline.Com*. Diakses Dari Hukumonline.Com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-restorative-justice-tidak-bisa-dilaksanakan-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63970ab5d474e/?Page=All>, Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4166.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255.

Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.

Peraturan Lain

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Surat Telegram Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

Dokumen Hukum

Committee on The Elimination of Discrimination Against Women. General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19. 201.

LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), Semarang, 2014.

International Criminal Court. Element of Crimes. 2002.

Rome Statute of the International Criminal Court. 1998.